



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
TENTANG KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".;

Mengakui pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan standar kehidupan sosial-ekonomi di masing-masing negara;

Menimbang bahwa kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus saling menguntungkan bagi kedua negara, dan bahwa kerjasama tersebut akan mempromosikan penerapan prestasi ilmiah dan teknologi baru untuk memperbaiki situasi ekonomi dan standar hidup, melindungi lingkungan dan meningkatkan hubungan bersahabat yang sudah ada antara kedua negara;

Berkeinginan untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah mencapai pemahaman berikut:

PL

HR

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk mempromosikan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara para Pihak atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

BIDANG KERJASAMA

Para Pihak akan bekerjasama di bidang prioritas berikut dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing negara dan kemampuan:

1. Teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pertanian;
3. Ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan;
4. Bioteknologi dan ilmu pengetahuan biomedis;
5. Energi;
6. Teknologi perairan;
7. Penanggulangan bencana;
8. Ilmu pengetahuan teknologi dirgantara dan aplikasinya;
9. Ilmu informasi geo-spasial;
10. Kimia terapan;
11. Material maju, termasuk nanoteknologi;
12. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3

BENTUK-BENTUK KERJASAMA

1. Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Pertukaran data dan informasi;
 - b) Kunjungan dan pertukaran ilmuwan, ahli teknis dan peneliti;
 - c) Penyelenggaraan seminar ilmiah, kursus pelatihan dan lokakarya, serta partisipasi para ahli dalam kegiatan tersebut;
 - d) Transfer teknologi antara kedua negara;
 - e) Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek bersama atau terkoordinasi;
 - f) Pengembangan kontak dan kerjasama antara lembaga pemerintah, universitas, pusat penelitian, lembaga, perusahaan sektor swasta, dan entitas lain dari kedua negara (selanjutnya disebut sebagai "entitas-entitas yang bekerjasama"); dan
 - g) Bentuk-bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
2. Kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus didasarkan pada tanggung jawab bersama dan kontribusi yang adil dan bermanfaat, sepadan dengan penguasaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing yang dimiliki oleh Para Pihak.

PASAL 4

BADAN PELAKSANA

Kementerian Riset dan Teknologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, bertindak sebagai badan pelaksana untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah MSP ini.

PASAL 5

KOMITE BERSAMA

1. Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dari MSP ini, Para Pihak akan membentuk Komite Bersama mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama") terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh para Pihak.

2. Fungsi Komite Bersama untuk:
 - a) Pertukaran informasi dan pandangan mengenai isu-isu kebijakan ilmiah dan teknologi;
 - b) Mengidentifikasi area prioritas dan bentuk kegiatan kerjasama di bawah MSP ini;
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah MSP ini;
 - d) Meninjau pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah MSP ini.
3. Komite Bersama akan bertemu secara bergantian di Tiongkok dan di Indonesia pada waktu yang disepakati bersama oleh para Pihak.
4. Dalam interval antara sesi Komite Bersama, penambahan atau perubahan dapat dilakukan untuk kegiatan kerjasama yang ada sebagaimana yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 6

PELAKSANAAN

Pengaturan pelaksanaan, yang meliputi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, topik dan sarana kegiatan kerjasama, kewajiban dan prosedur untuk transfer dan penggunaan peralatan dan dana yang terlibat dalam kegiatan kerjasama, pengaturan untuk akses ke sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait, dan isu lainnya yang relevan, untuk proyek-proyek kerjasama spesifik di MSP ini dapat dibahas dan ditentukan oleh entitas-entitas yang bekerja sama sebelum memulai proyek tersebut. Pengaturan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan di masing-masing negara. Istilah MSP ini akan berlaku untuk setiap pengaturan pelaksanaan.

PASAL 7

PENGATURAN KEUANGAN

1. Kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus tunduk pada ketersediaan dana.
2. Biaya untuk kegiatan kerjasama di bawah MSP ini akan dibagi oleh para Pihak sebagaimana yang disepakati bersama.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH MATERIAL

1. Setiap Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara dan konvensi serta perjanjian internasional yang negaranya telah terikat.
2. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan kerjasama akan diatur oleh ketentuan yang ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang spesifik dibahas dan ditentukan oleh kerja sama dengan pengawasan para Pihak, sebelum dimulainya kegiatan tersebut.
3. Dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dari para Pihak, dalam hal bahan penelitian yang digunakan dalam kolaborasi di bawah MSP ini perlu untuk ditransfer ke luar wilayah suatu Pihak ke Pihak lainnya, transfer dilakukan dengan menggunakan perjanjian alih material.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Masing-masing Pihak tidak akan membocorkan atau mengirimkan informasi, data yang diterima dari Pihak lainnya dari kegiatan-kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga tanpa izin resmi dari Pihak lainnya.

PASAL 10

SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT

Akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait termasuk, koleksi, konservasinya dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dalam MSP ini akan diatur dalam perjanjian khusus.

PASAL 11

FASILITASI KERJASAMA

Setiap Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negaranya, harus melakukan semua langkah yang wajar dan menggunakan usaha terbaik, untuk memfasilitasi masuk dan keluar dari wilayahnya orang-orang, peralatan dan bahan dari Pihak lain yang terlibat atau digunakan dalam kegiatan kerjasama di bawah MSP ini.

PASAL 12

KEGIATAN PERSONIL

1. Orang yang terlibat dalam kegiatan kerjasama di bawah MSP ini harus menghormati hukum dan peraturan nasional dan integritas nasional dari negara tuan rumah, dan bertindak sesuai dengan tujuan MSP ini.
2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dari Pasal ini harus bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 13

PERUBAHAN

MSP ini dapat dimodifikasi atau diubah berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak dengan pertukaran nota melalui saluran diplomatik.

PASAL 14

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 15

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU dan KEABSAHAN

1. MSP ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir yang disampaikan oleh salah satu Pihak mengkonfirmasi bahwa prosedur internalnya untuk berlakunya MSP ini telah terpenuhi.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua (2) tahun, dan selanjutnya wajib diperbaharui sesuai, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik tentang keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum tanggal kedaluwarsa.
3. Penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek yang sedang berjalan dan program di bawah ini MSP yang belum sepenuhnya dijalankan pada saat penghentian MSP ini.
4. Pada tanggal berlakunya MSP ini, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Ilmiah dan Teknologi yang ditandatangani pada 18 November 1994 menjadi tidak berlaku.

DENGAN DISAKSIKAN, yang bertandatangan di bawah ini, atas dasar kuasa yang sah oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2011, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Tiongkok, dan Inggris, semuanya wajib mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi terhadap MSP ini teks bahasa Inggris yang berlaku.

**PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

Signed

TEGUH RAHARDJO
Deputi Bidang Relevansi dan
Produktivitas Iptek

**PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK**

Signed

CAO JIANLIN
Wakil Menteri Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi



REPUBLIK INDONESIA

印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府 科学技术合作谅解备忘录

印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府(以下简称“双方”)鉴于科学、技术与创新对促进两国经济发展和提高社会经济生活水平的重要性;

认为科技合作符合两国的共同利益,有利于将科学成果和新技术应用于改善经济状况,提高生活水平,保护环境和增进两国现存的友好关系;

希望加强两国在科技领域的合作;

根据两国各自现行的法律法规;

达成谅解如下:

第一条 目标

本谅解备忘录的目标是在平等互利的基础上推动双方在科技领域的合作。

第二条 合作领域

双方根据各自的需求和能力,在以下重点领域开展合作:

- 一、信息通讯技术；
- 二、农业；
- 三、海洋和渔业科学；
- 四、生物及生物医学科技；
- 五、能源；
- 六、水技术；
- 七、灾害管理；
- 八、空间科技与应用；
- 九、地球空间信息学；
- 十、应用化学；
- 十一、先进材料，包括纳米技术；
- 十二、双方商定的其他领域的合作。

第三条 合作形式

- 一、双方鼓励并为以下合作形式提供便利：
 1. 交换数据和信息；
 2. 科学家、技术专家和研究人员的访问与交流；
 3. 组织科学研讨会、培训班和专题研讨会，并组织专家参与；
 4. 技术转让；
 5. 实施联合研究计划和项目；
 6. 促进双方的政府部门、大学、研究中心、机构、私营企业及其他单位（以下简称“合作机构”）的交流与合作；以及
 7. 双方商定的其他科技合作形式。

二、本谅解备忘录下的合作活动应基于与双方各自科技实力和资源相符的原则，公平分担责任、贡献和利益。

第四条 执行机构

印度尼西亚共和国政府指定研究与技术部，中华人民共和国政府指定科学技术部，作为本谅解备忘录的执行机构，协调并推动对本谅解备忘录下的合作活动。

第五条 联合委员会

一、为有效的实施本谅解备忘录，双方将各派代表，成立科技合作联合委员会（以下简称“联委会”）。

二、联委会职能如下：

1. 交换科技政策方面的信息和观点；
2. 确定本谅解备忘录下合作活动的优先领域和形式；
3. 推动本谅解备忘录下合作活动的实施；
4. 评估本谅解备忘录下合作活动的执行情况。

三、联委会将在双方商定的时间轮流在印尼和中国举行。

四、联委会休会期间，经双方同意，可对现有的合作活动进行补充或修改。

第六条 实施

在本谅解备忘录下，双方合作机构在具体实施合作项目前，可另行商定项目实施安排，内容包括但不限于合作活动的主题和形式、转让和使用合作活动相关的设备与资金所涉及的义务与程序、获取遗传资源和相关传统知识安排以及其他相关事宜。项目的实施安排应遵循双方现行的法律法规。本谅解备忘录的条款将适用于任何实施安排。

第七条 财务安排

- 一、本谅解备忘录下的合作活动根据双方所能提供的经费确定。
- 二、本谅解备忘录下的合作活动所需经费，应由双方一致同意的办法共同承担。

第八条 知识产权和材料转让

- 一、双方应根据各自国内现行法律法规及加入的国际公约，保护另一方在自己领土内的知识产权。
- 二、合作活动中产生的知识产权，应由双方在合作前商定的具体实施安排予以规定。
- 三、根据双方现行的法律法规，本谅解备忘录下合作所使用的研究材料，如需从一方境内转移至另一方境内，应签署材料转让协议。

第九条 保密

任何一方通过合作从另一方获得的信息或数据，未经另一方的正式同意，不得对外公开或向任何第三方转让。

第十条 遗传资源和相关传统知识

在本谅解备忘录下，遗传资源和相关传统知识的使用权限，包括搜集、保护和交换遗传资源和相关传统知识，应在具体实施安排中予以规定。

第十一条 合作活动的便利条件

一方应根据各自的法律，采取一切合理措施，尽最大努力为执行本谅解备忘录下合作活动的另一方人员和设备提供出入境的便利。

第十二条 人员行为

- 一、参与本谅解备忘录下合作活动的相关人员应尊重东道国的法律法规和国家完整，遵循本谅解备忘录的目标。
- 二、如一方人员违反本条第一款的规定，该人员应根据东道国的法律规定承担相应的法律责任。

第十三条 修正

经双方同意，本谅解备忘录可通过外交渠道，以互换照会的形式予以修正。

第十四条 争议解决

双方因解释或执行本谅解备忘录而产生的任何争议，应通过协商或谈判解决。

第十五条 生效、期限和有效期

1. 双方应通过外交途径相互通知已完成使本谅解备忘录生效所必需的国内法律程序。本谅解备忘录自后一份通知发出之日起生效。
2. 本谅解备忘录有效期5年。如在本谅解备忘录期满前6个月，任何一方均未通过外交渠道以书面形式通知对方要求终止本谅解备忘录，本谅解备忘录有效期将自动延长2年，并依此法顺延。
3. 本谅解备忘录的终止不影响在本谅解备忘录下已在执行的项目和计划的完成。
4. 自本谅解备忘录生效之日起，一九九四年十一月十八日于雅加达签订的《印度尼西亚共和国政府和中华人民共和国政府科学技术合作谅解备忘录》即行终止。

经各国政府正式授权，下列代表签署本谅解备忘录，以昭信守。

本谅解备忘录于二〇一一年十二月十三日在雅加达签署，一式两份，每份均用印尼文、中文和英文写成，三种文本同等作准。如对本谅解备忘录的解释发生分歧，以英文本为准。

印度尼西亚共和国政府
代表

Signed

中华人民共和国政府
代表

Signed

研究与技术部副部长
特谷·拉哈迪奥

科学技术部副部长
曹健林



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the "Parties"),

Recognizing the importance of science, technology and innovation in the development of their national economies and in the improvement of their socio-economic standard of life;

Considering that the cooperation in the fields of science and technology shall be of mutual benefit to both countries, and that such cooperation will promote the application of scientific achievements and new technologies to improve the economic situation and living standards, protect the environment and enhance the existing friendly relations between the two countries;

Desiring to strengthen cooperation between the two countries, particularly in the fields of science and technology;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

Have reached the following understanding:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to promote cooperation in the fields of science and technology between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.

R

林

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATIVE ACTIVITIES

The Parties shall cooperate in the following priority areas taking into consideration each country's need and capabilities:

1. information and communication technology;
2. agriculture;
3. marine and fisheries sciences;
4. biotechnology and biomedical sciences;
5. energy;
6. water technologies;
7. disaster management;
8. space sciences, technologies and applications;
9. geo-spatial information science;
10. applied chemistry;
11. advanced material, including nanotechnology;
12. any other areas as may be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3
FORMS OF COOPERATIVE ACTIVITIES

1. The Parties shall encourage and facilitate cooperative activities in the forms of the following:
 - a) exchange of data and information;
 - b) visits and exchanges of scientists, technical experts and researchers;
 - c) organization of scientific seminars, training courses and workshops, as well as participation of experts in those activities;
 - d) transfer of technology between the two countries;
 - e) execution of joint or coordinated programs and projects;
 - f) development of contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of the two countries (hereinafter referred to as the "cooperating entities");and

g) other forms of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.

2. Cooperative activities under this MoU shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources.

ARTICLE 4 EXECUTIVE AGENCY

The Ministry of Research and Technology, designated by the Government of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Science and Technology, designated by the Government of the People's Republic of China, shall act as Executive Agencies to coordinate and facilitate the cooperative activities under this MoU.

ARTICLE 5 THE JOINT COMMITTEE

1. For the purpose of effective implementation of this MoU, the Parties shall establish a Joint Committee on Scientific and Technological Cooperation (hereinafter referred to as the "Joint Committee") composed of representatives designated by the Parties.
2. The functions of the Joint Committee shall be to:
 - a) exchange information and views on scientific and technological policy issues;
 - b) identify the priority areas and forms of cooperative activities under this MoU;
 - c) facilitate the implementation of cooperative activities under this MoU;
 - d) review the implementation of cooperative activities under this MoU.
3. The Joint Committee shall meet alternately in Indonesia and China in at a time mutually agreed by the Parties.
4. In the intervals between the sessions of the Joint Committee, additions or amendment may be made to the existing cooperative activities as mutually agreed by the Parties.

ARTICLE 6
IMPLEMENTATION

The implementing arrangements, which cover, include but not limited to, topics and means of cooperative activities, obligations and procedures for transfer and use of equipment and funds engaged in cooperative activities, arrangements for access to genetic resources and associated traditional knowledge, and other relevant issues, for specific cooperative projects under this MoU may be discussed and determined by the cooperating entities prior to the initiation of such projects. Such implementing arrangements shall be in accordance with the prevailing laws and regulations in the respective countries. The terms of this MoU shall apply to any implementing arrangements.

ARTICLE 7
FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Cooperative activities under this MoU shall be subject to the availability of funds.
2. The expenses for cooperative activities under this MoU shall be shared by the Parties as mutually agreed upon.

ARTICLE 8
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND TRANSFER OF MATERIAL

1. Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the prevailing domestic laws and regulations in the respective countries and the international conventions and treaties which its country has acceded to.
2. The protection of intellectual property rights generated in the course of cooperative activities shall be governed by the terms set out in specific implementing arrangements discussed and determined by the cooperating entities with the supervision of the Parties, prior to the initiation of such activities.

3. Taking into account the prevailing laws and regulations in the respective countries of the Parties, in the event that research materials used in cooperative activities under this MoU require to be transferred outside of the territory of one Party to the other Party, the transfer shall be conducted using material transfer agreements.

ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY

Each Party shall not divulge or transmit the information or data received from the other Party from cooperative activities to any third party without the official permission of the other Party.

ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE

Access to genetic resources and associated traditional knowledge including their collection, conservation and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge under this MoU shall be regulated in specific implementing arrangements.

ARTICLE 11 FACILITATION OF COOPERATION

Each Party, subject to its laws and regulations, shall take all reasonable steps and use its best efforts, to facilitate entry into and exit from its territory of persons, equipment and materials of the other Party engaged or used in cooperative activities under this MoU.

ARTICLE 12
ACTIVITIES OF PERSONNEL

1. Persons engaged in cooperative activities under this MoU shall respect the domestic laws and regulations and the national integrity of the host country, and act in accordance with the purpose of this MoU.
2. Any persons who violate paragraph 1 of this article shall bear legal liability in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.

ARTICLE 13
AMENDMENT

This MoU may be modified or amended by mutual consent of the Parties by exchange of notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 14
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 15
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND VALIDITY

1. This MoU shall enter into force from the date of the later written notification from either Party confirming that its internal procedures for the entry into force of this MoU have been fulfilled.
2. This MoU shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for a further period of two (2) years, and shall thereafter be renewed accordingly, unless either Party notifies the other Party in writing through the

diplomatic channels of its intention to terminate this MoU six (6) months prior to the date of expiration.

The termination of this MoU shall not affect the completion of on-going projects and programmes under this MoU which have not been fully executed at the time of the termination of this MoU.

At the date of this MoU entering into force, the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Scientific and Technological Cooperation signed on 18 November 1994 shall be terminated.

WITNESS WHEREOF, the undersigned, being dully authorized thereto by their respective governments, have signed this MoU.

Done at Jakarta in duplicate, on this 13th day of December, 2011 in the Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

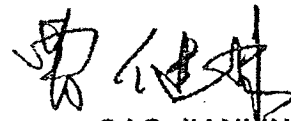
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



TEGUH RAHARDJO

Deputy Minister for Science and
Technology Relevance and Productivity

FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




CAO JIANLIN

Vice Minister of the Ministry of
Science and Technology

Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 021/BK/HI/03/2013/CTC
Number


Abdulkadir Jailani
NIP : 19660318 1993 1 001

Plt. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Act. Director for Economic, Socio-Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 28 Maret 2013
Date